UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Liminal Space of Recognition in Articulating Indigeneity: The Case of Tenure Conflict and Conservation Governance in Jurang Koak, East Lombok
Hassin Dzikry Ramadhan, Dr. Maharani Hapsari, Dr. Zainal Abidin Bagir
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Tenure conflicts in conservation areas are often framed primarily as legal-formal disputes or forestry criminal cases, leaving aside the broader sociological dynamics and identity struggles experienced by marginalized communities. In Mount Rinjani National Park (MRNP), the state's rigid territorial approach to conservation has come into conflict with the Jurang Koak community's lived space, creating exclusionary pressures that encouraged the community to strategically mobilize the narrative of ancestral land. This study examines how the Jurang Koak community articulates its indigenous identity as a discursive strategy of resistance against state enclosure and explores why this active articulation has not resulted in formal institutional recognition due to the structural limits embedded in state governance. Using a qualitative case study approach within a political ecology framework, this research draws on Tania Murray Li's concepts of indigenous articulation and the limits of recognition, complemented by Stuart Hall's theory of articulation. Data were collected through field observations, semi-structured interviews with community representatives and state officials, as well as an analysis of historical and legal documents.

The findings show that the *Pejuang Tanah Adat Jurang Koak* movement did not emerge from a fixed or primordial indigenous identity. Instead, it developed through a strategic process of identity articulation that brought together historical narratives, spatial practices, and engagement with the market economy. However, the community's hybrid livelihood strategies and commercial agricultural activities do not fit the state's essentialized understanding of indigeneity within the tribal slot, limiting their ability to obtain formal recognition. Rather than recognizing the community's territorial rights, the state's Conservation Partnership scheme provides only a conditional and asymmetric form of accommodation that operates as a technocratic mechanism for managing conflict. Consequently, the Jurang Koak community remains in a liminal space of recognition, namely a condition in which it is neither fully excluded nor formally recognized, but continues to navigate an uncertain position through ongoing negotiations with overlapping systems of authority.

Keywords: Tenure Conflict, Conservation, Articulation, Political Ecology, Liminal Space of Recognition

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Liminal Space of Recognition in Articulating Indigeneity: The Case of Tenure Conflict and Conservation Governance in Jurang Koak, East Lombok
Hassin Dzikry Ramadhan, Dr. Maharani Hapsari, Dr. Zainal Abidin Bagir
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Konflik tenurial di kawasan konservasi sering kali dibingkai terutama sebagai sengketa formal-hukum atau kasus pidana kehutanan, dengan mengabaikan dinamika sosiologis yang lebih luas serta pergulatan identitas yang dialami oleh masyarakat terpinggirkan. Di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pendekatan teritorial negara yang kaku terhadap konservasi telah berbenturan dengan ruang hidup komunitas Jurang Koak, menciptakan tekanan eksklusi yang mendorong komunitas tersebut untuk memobilisasi narasi tanah leluhur secara strategis. Studi ini mengkaji bagaimana komunitas Jurang Koak mengartikulasikan identitas adatnya sebagai strategi diskursif perlawanan terhadap pengurungan oleh negara, serta mengeksplorasi mengapa artikulasi aktif ini belum menghasilkan pengakuan kelembagaan formal akibat batasan struktural yang melekat dalam tata kelola negara. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dalam kerangka ekologi politik, penelitian ini merujuk pada konsep artikulasi masyarakat adat dan batas-batas pengakuan dari Tania Murray Li, yang dilengkapi dengan teori artikulasi Stuart Hall. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan perwakilan masyarakat dan pejabat negara, serta analisis dokumen historis dan hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan Pejuang Tanah Adat Jurang Koak tidak muncul dari identitas masyarakat adat yang tetap atau primordial. Sebaliknya, gerakan ini berkembang melalui proses strategis artikulasi identitas yang memadukan narasi historis, praktik spasial, dan keterlibatan dengan ekonomi pasar. Kendati demikian, strategi penghidupan hibrida dan aktivitas pertanian komersial komunitas tersebut tidak sesuai dengan pemahaman esensialistis negara mengenai keadatan dalam kerangka tribal slot, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh pengakuan formal. Alih-alih mengakui hak teritorial komunitas, skema Kemitraan Konservasi negara hanya menyediakan bentuk akomodasi yang bersyarat dan asimetris, yang beroperasi sebagai mekanisme teknokratis untuk mengelola konflik. Akibatnya, komunitas Jurang Koak tetap berada dalam ruang liminal pengakuan, yakni suatu kondisi di mana mereka tidak sepenuhnya dieksklusi namun juga tidak diakui secara formal, melainkan terus menavigasi posisi yang penuh ketidakpastian melalui negosiasi yang sedang berlangsung dengan sistem otoritas yang saling tumpang tindih.

Kata Kunci: Konflik Tenurial, Konservasi, Artikulasi, Ekologi Politik, Ruang Liminal Pengakuan